

**DISPATCHING INDONESIAN WORKERS TO MALAYSIA:
A STRATEGY TO OVERCOME THE POVERTY AND EDUCATION COST
(Case Study of Indonesian Workers of Central Java with Phenomenology Approach)**

Tjipto Subadi¹⁾ Samino²⁾

¹⁾ Geographical Education, School of Teacher and Training Education
Muhammadiyah University of Surakarta

¹⁾ tjipto.subadi@ums.ac.id atau tjiptosubadi@yahoo.com

²⁾ Elementary Teacher Education, School of Teacher and Training Education
Muhammadiyah University of Surakarta

²⁾ samino@ums.ac.id atau samino0462@gmail.com

Abstract

The objectives of the research are describing 1) a dispatching model of Indonesian workers to Malaysia and 2) the core problems of Indonesian workers in Malaysia. The research applied a phenomenology qualitative approach with focusing on micro social mobility. The subjects of the research were Indonesian workers and their family, government, head of neighborhood members, and the House of Representatives. It was located in Central Java. The techniques of the data collecting included observation, interviewing, and documentation. The data validation employed the first order understanding and second order understanding. The data were analyzed with an interactive model: data reduction, data display, and conclusion. It could be concluded that 1) the dispatching model was using an exposure approach and bottom-up approach. An employment process of the Indonesian workers was in three stages: pre-, core-, and post-provisions of work. A strategy of overcoming the poverty and education cost used a religious approach and efficient financial management. 2) The problems of the workers covered that a) the employers treated most of them violently; b) most of the workers' contracts expired; and c) most of them used illegal passports (visiting passports) or documents so that they did not get any protection

Keywords: Indonesian workers, overcoming, poverty, cost, education

1. PENDAHULUAN

Secara sosiologis mobilitas penduduk baik yang permanen (migrasi) maupun non-permanen (sirkuler) merupakan fenomena yang telah berlangsung lama mengikuti perjalanan peradaban manusia. Perpindahan penduduk dari negara asal ke negara lain sering terjadi di hampir seluruh belahan dunia, dengan jumlah yang terus meningkat dan alasan yang beragam. Banyak alasan seseorang bermigrasi, antara lain; alasan kemiskinan (makna ekonomi), merubah nasib, meningkatkan status, (makna status sosial) untuk mengatasi biaya sekolah anak-anaknya (makna edukatif).

TKI merupakan bagian dari proses migrasi internasional. Pada awalnya, migrasi tenaga kerja ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja jangka pendek (*short-*

terms labor shortages), seperti yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1950-an, dengan mendatangkan pekerja-pekerja asal Meksiko. Pertumbuhan penduduk yang lambat dikombinasikan dengan kondisi perekonomian yang cukup baik di kawasan Eropa Utara dan Eropa Barat pada tahun 1960 sampai pertengahan tahun 1970, juga membuka peluang bagi masuknya pekerja asing. (John Weeks, 1974: 203).

Di Indonesia, secara formal migrasi telah dimulai sejak tahun 1905 dengan tujuan untuk memenuhi permintaan kebutuhan pekerjaan perkebunan. Pemerintah Belanda waktu itu telah memindahkan 155 Kepala Keluarga dari Jawa ke Gedong Tataan, Sumatra Selatan (Mantra, 1988: 160).

Di Jawa Tengah juga terjadi migrasi, menurut Subadi (2013) dalam *Journal International Research on Humanities and*

Social Sciences, menjelaskan; *Nevertheless, the number of transmigration in Central Java decreased from 2003 to 2007. "In 2003, a transmigration target was 1,249 heads of households and only 1,087 heads of households did migrate (3,989 people). In 2007, a transmigration target was 856 heads of households but only 581 heads of household had migrated (2,158 people)".* (Jumlah migrasi di Jawa Tengah "pada tahun 2003 dari target 1.249 KK dapat terealisasi 1.087 KK dengan jumlah jiwa 3.989 orang, sedang pada tahun 2007 dari target 856 KK dapat terealisasi 581 KK dengan jumlah jiwa 2.158 orang").

Femomena migrasi di Jawa Tengah tersebut tidak bisa terlepas dengan jumlah penduduk, jumlah lowongan kerja dan jumlah pencari kerja, jika jumlah lowongan kerja pada suatu negara (Indonesia) lebih sedikit dari jumlah pencari kerja maka akan terjadi pengangguran. Solusinya adalah pengiriman tenaga kerja ke negara lain.

Berdasarkan study dokumentasi 2015 ditemukan data jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 34, 67 juta. Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada tahun 2014 dicerminkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 25.181.967 orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2014 sebanyak 16.550.682 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja Jawa Tengah Tahun 2015 (terhitung Januari-Mei 2015), total lowongan kerja Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.519, sedangkan total pencari kerja 13.271 orang, yang berarti terjadi pengangguran 9.752 orang. (Sumber: Disnakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2015).

Angkatan kerja Tahun 2013 sebanyak 17.524.022 orang, jumlah yang bekerja 16.469.960 orang, dengan tingkat pengangguran sebanyak 1.054.062 orang. Sedangkan Angkatan kerja Tahun 2014 sebanyak 17.547.026 orang, jumlah yang bekerja 16.550.682 orang, dengan tingkat pengangguran SD 339.713 orang (34,11); SMP 262.746 orang (26,38); SMA 354.999 orang (35,63); D1-D3 14.660 orang (1,48); S1 26.226 orang (2,64).

Jumlah TKI Jawa Tengah ke luar negeri pada tahun 2014 sebanyak 41.445 orang TKI informal; dan 51.160 orang TKI formal, sedangkan pada tahun 2015 (Januari-Mei) sebanyak 12.258 orang TKI informal; dan 13.018 orang TKI formal. Sedangkan jumlah

TKI Jawa Tengah ke Malaysia pada tahun 2013 sebanyak 4.750 orang TKI informal; dan 21.619 orang TKI formal. Pada tahun 2014 sebanyak 3.898 orang TKI informal; dan 17.300 orang TKI formal. Pada tahun 2015 (Januari-Muni) sebanyak 1.024 orang TKI informal; dan 4.996 orang TKI formal. (Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, dikutip 23 April, 2015).

Cukup tingginya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja, meskipun telah diupayakan melalui pemberian pelatihan, pembinaan usaha mandiri, pembinaan sektor informal, peningkatan usaha ekonomi produktif dan perluasan kesempatan kerja ke luar negeri. Banyaknya pengangguran di Jawa Tengah akan menambah jumlah kemiskinan di Jawa Tengah, karena itu solusi untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah adalah pengiriman Tenaga Kerja ke luar negeri termasuk ke Malaysia.

Menurut Ahmad Kamil Mohamed (2007), bahwa; Malaysia merupakan salah satu negara pengimport buruh asing terbesar di Asia. Lebih kurang 20 % dari tenaga kerjanya terdiri dari pada warga asing, yang sebahagian besar ditempatkan di dalam bidang pembinaan, ladang kelapa sawit dan perkhidmatan domestik. Hampir setengah juta warga asing haram, kebanyakan warga Indonesia telah meninggalkan Malaysia semasa program pengampunan yang berakhir 28 Februari 2004. Keadaan ini telah menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang banyak di Malaysia dan menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit terhadap industri terbabit.

Indonesia menjadi salah satu sumber tenaga kerja terbesar di Malaysia, dan penyumbang TKI cukup besar adalah Propinsi Jawa Tengah, khususnya melalui kota Semarang. Bagi pemerintah Indonesia, arus TKI ke Malaysia adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran (kemiskinsn) dan biaya pendidikan anak-anaknya, serta memberikan kontribusi bagi pemasukan devisa negara. Diperkirakan setiap tahun pemasukan devisa sebesar US\$ 2,6 juta dibawa masuk ke Indonesia oleh para TKI yang bekerja di luar negeri (Darwin, dkk., 2005: 280), menurut catatan Disnakertransduk remitan yang dikirim para TKI ke Jawa Tengah sebesar Rp. 926.085.803.912 pada tahun 2009. Penerimaan remittance TKI Jawa

Tengah Tahun 2012-2014 (tahun 2012 Rp. 949.629.504.299; tahun 2013 Rp. 242.585.530.640; tahun 2014 Rp. 1.591.515.609.090).

Pengiriman TKI ke luar negeri pada satu sisi memang dibutuhkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan anak-anaknya, tetapi pada sisi yang lain muncul banyak masalah, seperti kasus-kasus peniksaan TKI di Malaysia yang dialami antara lain kasus Siti Supeni, Umdiyah, sampai hari ini masih menyisakan kesedihan yang mendalam dan belum “terselesaikan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu; 1) Bagaimana model pengiriman TKI ke Malaysia secara profesional sebagai alternatif mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan anak-anak di Jawa Tengah? 2) Apa masalah utama TKI di Malaysia?

Tujuan penelitian ini, mengkaji; 1) Model pengiriman TKI ke Malaysia secara profesional sebagai alternatif mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan di Jawa Tengah, 2) Masalah utama TKI di Malaysia.

2. KAJIAN LITERATUR

a. Migrasi

Mobilitas penduduk desa-kota baik yang permanen (migrasi) maupun yang non-permanen (sirkulasi), pada hakikatnya memiliki kesamaan terutama tentang daya dorong dan dalam hal proses pengambilan keputusan untuk melakukan mobilitas (Mantra, 1987: 140-144;). Ketetapan menjadi migran permanen atau non-permanen tersebut sangat tergantung pada kemampuan kota dalam mengembangkan industrialisasi (Sutomo 1993: 22) termasuk di dalamnya kesempatan kerja sektor perdagangan, sektor pembantu rumah tangga dan sektor-sektor yang lain. Suatu mobilitas penduduk akan terjadi apabila individu memutuskan lebih baik pindah dari pada menetap tinggal, karena kepindahan tersebut dirasa akan lebih menguntungkan.

Mekanisme migrasi selalu berhubungan dengan proses pengambilan keputusan, teori yang cocok untuk memahami mekanisme tersebut adalah teori dorong-tarik (*push-pull theory*) Lee. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap fenomena migrasi selalu berkaitan dengan daerah asal, daerah tujuan, dan

bermacam-macam rintangan yang menghambat. Menurut Lee, ada empat faktor yang berpengaruh orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu; (1) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor-faktor di daerah tujuan, (3) faktor rintangan, dan (4) faktor pribadi.

Faktor-faktor di daerah asal dan daerah tujuan dapat bersifat positif, negatif atau bersifat netral. Faktor-faktor di daerah asal dikatakan positif kalau sifatnya mendorong migran, negatif kalau menghambat migran, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migran. Sedangkan faktor-faktor di daerah tujuan dikatakan positif jika menarik calon migran, negatif kalau menghambat masuknya calon migran, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migran (Lee, 1966, diterjemahkan oleh Daeng, ditinjau kembali oleh Mantra, 1987: 5).

Kesimpulan yang diambil dari penelitian migrasi Lee ini adalah: (1) Migrasi berkait erat dengan jarak, (2) Migrasi bertahap, (3) Migrasi arus dan migrasi arus balik. (4) Terdapat perbedaan antara desa dan kota mengenai kecenderungan melakukan migrasi. (5) Wanita lebih suka bermigrasi ke daerah-daerah yang dekat. (6) Mengikat teknologi dengan migrasi. (7) Motif ekonomi merupakan dorongan utama orang bermigrasi.

b. Perlindungan TKI oleh Pemerintah RI

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 77 (1) Setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Pasal 78 (1) Perwakilan RI memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional (2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan RI tertentu (3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79 Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksanaan penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. Pasal 80 (1) Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain : (a) Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional. (b) Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan /atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. (2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

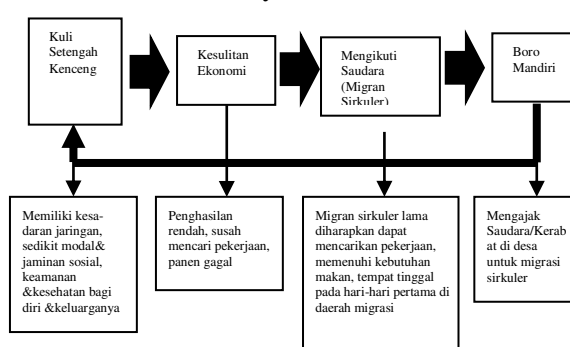
Pasal 81 (1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri. (2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. (3) Ketentuan mengenai penghentian dan pelanggaran penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan TKI oleh Pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan Garis Panduan dan Syarat-syarat Pengambilan Pembantu Rumah Asing (PRA). Bahagian Pekerja Asing, Jabatan Imigrasi Malaysia (2006) telah menggariskan keluar 30 garis panduan dan syarat-syarat pengambilan pembantu rumah asing kepada semua majikan atau agensi pembantu rumah.

Penelitian Subadi (2004) berjudul: "Migrasi Masyarakat Desa Tegalombo Sragen (Kajian Migrasi Sirkuler dari Perspektif Fenomenologi)" berkesimpulan bahwa; struktur masyarakat desa terdiri dari: kuli kenceng, kuli setengah kenceng dan kuli ngindung. Migran Sirkuler dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat "kuli setengah kenceng" yang; (1) memiliki kesadaran jaringan dengan orang yang sedang *migrasi*

sirkuler (2) memiliki sedikit modal untuk beralih mata pencaharian petani ke pedagang di daerah tujuan *migrasi sirkuler* (3) memiliki jaringan sosial dengan migran lama, jaminan keamanan dan jaminan kesehatan bagi dirinya dan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Proses migrasi sirkuler; kelompok kuli setengah kenceng → menghadapi kesulitan ekonomi (penghasilan rendah, susah mencari pekerjaan, gagal panen) → mempunyai jaringan sosial (hubungan dengan migran lama), sedikit modal, dan jaminan sosial seperti keamanan dan kesehatan bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan → mengikuti saudara/migran yang sukses (diharapkan dapat mencarikan pekerjaan, memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal pada hari-hari pertama di daerah migran) → menjadi migran mandiri → mengajak saudaranya di desa untuk migrasi sirkuler, dan seterusnya.



Gambar 1 Proses Migrasi

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, paradigmanya definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro.

Subjek penelitian ini, TKI Jawa Tengah yang ditempatkan di Malaysia. Informan penelitian; TKI, keluarga TKI, Ketua RT, Pejabat Disnakerasduk, BP3TKI, anggota DPRD Propinsi Komisi E.

Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teori *first order understanding* dan *second order understanding* (Subadi, 2013), dengan tiga alur kegiatan yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles Huberman, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Model Pengiriman TKI.

Study wawancara dan dokumentasi tentang model pengiriman TKI ke luar negeri, hasilnya sebagai berikut: 1) Pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. 2) Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan. 3) Ijin penempatan. 4) Kegiatan penempatan di bagi menjadi tiga tahapan: Pra penempatan; Masa penempatan; dan Purna penempatan” (Wawancara 21 Mei 2015 dengan Aziz Syakir).

Selain itu, model pengiriman TKI ke Malaysia menggunakan pendekatan paparan (*exposure approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*a bottom-up approach*), melalui tiga tahap; yaitu Pra-penempatan, Masa penempatan dan Purna penempatan. TKI mempunyai banyak makna, yaitu; makna ekonomi; makna mengubah nasib, makna religiusitas, dan makna pendidikan. Masalah TKI di Malaysia, selain permasalahan tindak kekerasan oleh majikan terhadap TKI, masalah mendasar bagi ketenaga kerjaan di Malaysia adalah; a) banyak TKI yang tidak memperpanjang kontrak kerja tapi tetap kerja di Malaysia; b) banyak TKI yang berangkat ke Malaysia secara ilegal dengan paspor kunjungan; dan c) banyak TKI yang berangkat tanpa dokumen secara legal, yakni; lewat calo/sponsor, sehubungan dengan 3 hal tersebut, maka TKI tidak mendapatkan perlindungan.

Kegiatan pra-penempatan TKI di luar Negeri ini antara lain; Pengurusan SIP (Surat Ijin Pengurusan), Perekrutan dan seleksi, Pendidikan dan pelatihan kerja, Pemeriksaan kesehatan dan psikologi, PAP (Pembekalan akhir pemberangkat an), Perjanjian kerja, KTKLN (Ketentuan Tenaga Kerja Luar Negeri), Pengurusan dokumen dan Pemberangkatan.

Kegiatan masa penempatan; TKI sampai di negara tujuan penempatan di jempot oleh

mitra usaha / pengguna; TKI bekerja diluar negeri melapor ke KBRI setempat yang dilakukan oleh PPTKIS/Mitra Usaha/Pengguna; Apabila timbul permasalahan dalam masa bekerja melapor ke KBRI/Mitra Usaha/PPTKIS yang menempatkan; Apabila masa kontrak berakhir TKI segera melaporkan.

Kegiatan purna penempatan; kepulangan TKI terjadi karena; berakhirnya masa perjanjian kerja; pemutusan hubungan kerja; terjadi perang; bencana alam atau wabah penyakit di negara tujuan; mengalami kecelakaan kerja; meninggal dunia di negara tujuan; cuti; dan dideportasi oleh pemerintah setempat.

Hasil wawancara kepada Sarmini dapat dideskripsikan sebagai berikut: Saya bekerja ke Malaysia didorong oleh keinginan akan melanjutkan kuliah S1, prinsip untuk mencapai cita-cita saya ini selalu “berdoa” dan dengan “manajemen keuangan gemi, setiti, ngati-ati” yaitu perilaku tidak konsumtif dan tidak salah langkah dalam memilih dan mengatur skala prioritas kebutuhan yang bermanfaat. Sebagian gaji saya kirim ke orang tua sebagai tanda berbaktinya anak kepada orang tua, sebagian gaji saya tabung untuk masa depan agar kelak tidak kesulihan dalam biaya hidup (tidak miskin), sebagian saya tabung (bangunan pendidikan) tabungan untuk biaya sekolah. Selama 2 tahun, saya bekerja sambil menabung, setelah 2 tahun saya bekerja, saya bekerja sambil kuliah di Universitas Terbuka Malaysia (*Open University of Malaysia*), Alhamdulillah bias berhasil lulus sebagai sarjana.

Menurut keterangan Nunung, TKI yang pulang dilakukan pemantauan sampai di daerah asal, pada prinsipnya penempatan TKI di luar negeri sebagai berikut; a) pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. b) Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengiriman dan

penempatan TKI asal Jawa Tengah secara profesional: 1) Apabila negara tersebut telah melakukan MOU atau perjanjian tertulis dengan pemerintah RI. 2) Apabila negara tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. 3) Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan. 4) Kegiatan penempatan di bagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pra-penempatan; tahap masa penempatan; dan tahap purna penempatan. 5) Pemerintah melakukan pemantauan terhadap TKI yang pulang sampai di daerah asal.

b. Permasalahan TKI di Malaysia

Permasalahan utama yang dialami oleh TKI di Malaysia adalah perlakuan kasar oleh majikan kepada TKI, misalnya; kasus Siti Supeni, kasus Umdiyah, dan Kasus Sutilah.

Kasus mantan TKI Siti Septini (Telogorejo RT.05/07 Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah), Siti Supeni tidak kerasan bekerja di Malaysia karena tidak tahan mendapat perlakuan kasar oleh majikannya di Malaysia, ia sering dipukul, penyebabnya tidak diketahui oleh Septini “saya tidak tahu kesalahan saya” ungkap Septini, majikan saya tuntutan kekerjaan sangat tinggi, misalnya ketika saya mengepel lantai selalu “diminta mengulangi”, di Malaysia kata Majikan saya “tidak mengenal salah kecil atau salah besar” salah ya salah, majikan itu main pukul, hampir setiap hari ia dipukul, ia menjelaskan: Majikan saya yang perempuan galak, sering main pukul, saya sering dipukul, saya tidak tahu kesalahan saya, tahu-tahu dia marah-marrah, kalau saya membantah dituduh berani kepada majikan, pernah saya pernah disiram air panas, kemudian saya lari melapor minta tolong kepada tetangga kemudian tetangga telpon polisi, kemudian saya dijemput polisi dibawa ke klinik untuk berobat, saya minta pulang tidak boleh, Saya sebenarnya tidak tahan tetapi minta pulang tidak boleh, boleh pulang asalkan suami saya kirim uang dulu ke mereka, baru saya boleh pulang. (Wawancara 11 Juni 2015).

Kasus mantan TKI Umdiyah, (Bandar, Batang, Jawa Tengah). Umdiyah sering diperlakukan kasar oleh majikan, dan tidak mengerti sebabnya, ia tidak merasa salah tetapi

selalu mendapatkan perlakuan kasar dengan kata-kata kasar dan dipukul, ia menjelaskan: Saya disuruh membersihkan kamar mandi sudah saya bersihkan, tahu-tahu saya dipukul, saya tidak mengerti kesalahan saya, menurut saya “saya tidak salah”, Saya disuruh membersihkan kolah bagian-bagian yang lumuten saya sikat, dinding yang belum dikramik pada bagian yang kotor saya bersihkan, katanya salah saya dimarahi, saya dipukul, Pada saat saya menjemur pakaian diluar saya dijambak rambut saya, saya dikatakan berani dengan majikan, kemudian saya dijambak, saya bekerja lagi mencuci saya ditarik kuping saya. Saya sering dituduh makan makanan kecil (snek) padahal saya tidak makan, kalau ada makanan kecil habis saya yang dituduh makan. Kemudian saya dipukul. Saya benar-benar tidak kerasan, baru 7 bulan saya bekerja saya minta pulang. (Wawancara 11 Juni 2015).

Kasus mantan TKI Sutilah (Desa Bango, Demak, Jawa Tengah). Sutilah ini menjadi TKI legal di Malaysia, berangkat sebagai Tenaga Kerja Indonesia melalui PJTKI Arini Famili Ungaran, Jawa Tengah, ia mengalami depresi karena mendapatkan perlakuan kasar oleh majikannya selama bekerja di Kuala Lumpur. Hasil study dokumentasi di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, diperoleh data, bahwa; “Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Siswo Laksono dalam Nota Dinasnya yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekda, Nomor 560/6974 tertanggal 26-8-2009 Perihal Laporan Kasus TKI a.n. Sutilah dari Demak. Isi nota dinas tersebut adalah “Sutilah yang bekerja di Malaysia melalui PJTKI PT Arni Famili Kabupaten Semarang telah diberlakukan sebagai budak dan disiksa oleh majikan karena menolak menuruti hawa nafsu majikan. Disamping itu majikan juga melakukan kekerasan dan hanya memberi makan roti dan apel. Memasuki bulan ketiga Sutilah menderita sakit dan oleh majikan diusir dari rumahnya, kemudian ditemukan oleh seorang sopir yang berasal dari Surabaya lalu dibawa ke KBRI Kuala Lumpur. (wawancara 11 Juni 2015).

Dari studi kasus tiga mantan TKI tersebut di atas bahwa menjadi TKI di Malaysia satu sisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah senagai upaya mengatasi permasalahan

kemiskinan masyarakat pedesaan dan sebagai upaya masyarakat Jawa Tengah untuk mengatasi biaya pendidikan anak-anaknya. Namun pada sisi lain terdapat permasalahan, yaitu 1) Perlakuan kasar oleh majikan terhadap TKI. 2) Penyebab perlakuan kasar tersebut tidak diketahui secara pasti, sehingga TKI tidak bias memperbaiki kesalahannya. 3) Majikan tidak memiliki interpretasi kesalahan ringan atau berat, kesalahan ya kesalahan yang aka nada konsekuensi hukuman.

Permasalahan tersebut sejalan dengan penelitian Subadi dan Ismail (2013) yang berjudul: *Indonesian Female Migrants and Employers' Mistreatment in Malaysia: a Case of Domestic Servants from Central Java, in the International Journal Research on Humanities and Social Sciences: "The finding show that the main reasons why the Indonesian domestic servants were badly treated were lack of communication skills and low level of competency; different culture; feudalism; bad institutional structure; and the differences in the Act between Indonesia and Malaysia"* ("temuan menunjukkan bahwa alasan utama mengapa pembantu rumah tangga Indonesia yang diperlakukan buruk adalah kurangnya komunikasi keterampilan dan rendahnya tingkat kompetensi; budaya yang berbeda; feodalisme; struktur kelembagaan yang buruk; dan perbedaan dalam UU antara Indonesia dan Malaysia").

Selain sejumlah permasalahan tersebut di atas masalah mendasar TKI di Malaysia, Menurut Azis Syakir (2015), selain permasalahan tentang tindak kekerasan oleh majikan terhadap TKI di Malaysia, masalah yang mendasar bagi ketenaga kerjaan di Malaysia maupun di Negara lain adalah banyak TKI yang tidak memperpanjang kontrak kerja tapi tetap kerja di Malaysia; banyaknya TKI yang berangkat ke Malaysia secara ilegal dengan paspor kunjung; dan banyaknya TKI yang berangkat tanpa dokumen secara ilegal murni yakni lewat calo /sponsor. Sehubungan dengan 3 hal tersebut, maka TKI tidak mendapatkan perlindungan.

Fenomena penyiksaan TKI di Malaysia oleh majikannya sama sekali tidak menyurutkan niat warga Jawa Tengah untuk menjadi tenaga kerja ke Malaysia. Jumlah pengiriman TKI ke Malaysia tahun 2013 sebanyak 21.619 orang, tahun 2014 sebanyak

17.300 orang, sedangkan tahun 2015 (terhitung sampai bulan Mei 2015) sebanyak 4.996 orang.

5. SIMPULAN

Model pengiriman TKI ke Malaysia menggunakan pendekatan paparan (*exposure approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*a bottom-up approach*), melalui tiga tahap; yaitu Pra-penempatan, Masa penempatan dan Purna penempatan.

Strategi TKI mengatasi kemiskinan dan biaya pendidikan dengan; a) pendekatan religius yakni "selalu berdoa" dan "berbakti kepada orang tua" (bagi yang masih berstatus sebagai anak), "berbakti kepada suami bagi yang berstatus sebagai istri" b) pendekatan "manajemen keuangan gemi, seliti, ngati-ati" perilaku tidak konsumtif dan tidak salah langkah dalam memilih dan mengatur skala prioritas kebutuhan yang bermanfaat. c) pendekatan "tabungan masa depan" dan "tabungan pendidikan". Bekerja sambil menabung, dan bekerja sambil kuliah. Sarmini TKI yang sukses lulus sarjana S1 di Universitas Terbuka Malaysia (*Open University of Malaysia*).

Masalah Mendasar TKI di Malaysia, selain permasalahan tentang tindak kekerasan oleh majikan terhadap TKI di Malaysia, masalah yang mendasar bagi ketenaga kerjaan di Malaysia maupun di Negara lain adalah banyak TKI yang tidak memperpanjang kontrak kerja tapi tetap kerja di Malaysia; banyaknya TKI yang berangkat ke Malaysia secara ilegal dengan paspor kunjung; dan banyaknya TKI yang berangkat tanpa dokumen secara ilegal murni yakni lewat calo /sponsor. Sehubungan dengan 3 hal tersebut, maka TKI tidak mendapatkan perlindungan.

Berita penyiksaan TKI di Malaysia oleh majikannya sama sekali tidak menyurutkan niat warga Jawa Tengah untuk menjadi tenaga kerja ke Malaysia. Jumlah pengiriman TKI ke Malaysia tahun 2013 sebanyak 21.619 orang, tahun 2014 sebanyak 17.300 orang, sedangkan tahun 2015 (terhitung sampai bulan Mei 2015) sebanyak 4.996 orang.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih peneliti sampaikan kepada:
a) Pemerintah c.q Dikti DP2M yang telah memberikan persetujuan dan dana penelitian ini. b) Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi mitra dalam penelitian ini. c) Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan rekomendasi dan ijin penelitian.

7. REKOMENDASI

Rekomendasi disampaikan kepada pemerintah, agar diupayakan penyusunan strategi kebijakan penataan kependudukan, strategi dalam menciptakan kesempatan kerja dan pengembangannya, yang berkaitan dengan sistem informasi kesempatan kerja. Kepada Pemda, agar ada kebijakan untuk memfasilitasi para penaci kerja dan keluarganya, misalnya; perbankan (koperasi simpan pinjam), asuransi jaminan social, atau fasilitas lain yang bisa meringankan beban keluarganya.

8. REFERENSI

Abu-Loghod and Richard Hay Jr. (eds.). *Strid World Urbanization*. London: Longman.

ILO. 2000. *Trafficking of Women and Children in Indonesia: A preliminary description of the situation*. Jakarta.

Berger. P. and T. Luckmann. 1967. *The Social Construction of Reality*. London: Allen Lane.

Firman T. 1994. *Migrasi Antar Propinsi dan Pengembangan Wilayah di Indonesia*. dalam Prisma No. 7 tahun XXIII. Juli. LP3ES.

John Weeks. 1974. *Population: An Introduction to Concepts and Issues*. California: Wadsworth Publishing Company.

Lee, E. S. 1966. *A Theory of Migration* Demography 3 (1). Alexandria: Population Association of America.

Mantra, I. B. 1981. *Population Mobility in West Java*. Ph.d Thesis. Yogyakarta: GajahMada University Press.

-----, 1991. *Population Movement In West Rice Communities: A Case Study of Two Dukuh In Yogyakarta Special Region*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

-----, dan Sumantri. 1988. *Migrasi Penduduk Aceh Berdasarkan Data Supas 1985*. Jakarta: Kerjasama LDFE Universitas Syah Kuala dan Kantor Menteri Negara KLH.

Miles Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* Third Edition. Arizona State University: SAGE Publications, Inc.

Subadi T. 2004. *Boro: Mobilitas Penduduk Masyarakat Tegalombo Sragen*. Surabaya: Seri Disertasi UNAIR.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004. *Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.